

**PENGARUH PINJAMAN BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT)
TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI NAGARI SALO
KECAMATAN BASO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

FERI VADLI
NIM/BP 73950 / 2006

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PINJAMAN BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT) TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI NAGARI SALO KECAMATAN BASO

NAMA : FERI VADLI
BP/NIM : 2006/73950
KONSENTRASI : PERENCANAAN PEMBAGUNAN
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Hj. Mirna Tanjung, M.S
NIP: 19491215 197703 2 001

Drs. Akhirmen, M.Si
NIP: 19621105 198709 1 002

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

PENGARUH PINJAMAN BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT) TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI NAGARI SALO KECAMATAN BASO

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nama | : Feri Vadli |
| BP/NIM | : 2006/73950 |
| Keahlian | : Perencanaan Pembangunan |
| Program Studi | : Ekonomi Pembangunan |
| Fakultas | : Ekonomi |

Padang, Mei 2011

Tim Penguji

| No. Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Ketua | Dra.Hj. Mirna Tanjung, M.S | 1..... |
| 2. Sekretaris | Drs. Akhirmen, M.Si | 2..... |
| 3. Anggota | Dra. Armida S, M.Si | 3..... |
| 4. Anggota | Doni Satria, SE.M.SE | 4..... |

ABSTRAK

Feri Vadli (2006/73950): Pengaruh Pinjaman Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Nagari Salo Kecamatan Baso. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang di bawah Bimbingan Ibuk Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pinjaman Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di nagari Salo kecamatan Baso.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan Asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *Total Sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan kepada responden dengan menggunakan angket. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011. Data dianalisis dengan teknik Analisis Deskriptif dan Induktif, dengan menggunakan analisa (1) Uji Normalitas, (2) uji heteroskedastisitas (3)Analisis regresi linear sederhana, (4) Analisis Determinasi (r^2), (5) Uji t dengan menggunakan $\alpha = 0,05$

Hasil penelitian mengungkapkan pinjaman BMT memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso dengan nilai $Sig = 0.000$. tingkat pengaruhnya adalah sebesar 0,294 persen. Besar Rata-rata pinjaman (X) yang dilakukan masyarakat kepada BMT adalah sebesar Rp 1.712.162,16 sedangkan rata-rata pendapatan masyarakat setelah pinjaman BMT adalah Sebesar Rp 1.581.170,14.

Dari hasil penelitian maka disarankan kepada masyarakat nagari Salo kecamatan Baso agar meningkatkan pinjaman ke BMT. Dan diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat tetap mempertahankan keberadaan BMT di nagari Salo sebagai lembaga tempat masyarakat melakukan pinjaman dan pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan jumlah Saldo di BMT nagari Salo. BMT diharapkan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar penggunaan pinjaman dapat dioptimalkan dalam peningkatan pendapatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pinjaman Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pendapatan Masyarakat di Nagari Salo Kecamatan Baso”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan masukan dari Ibuk Dra. Mirna Tanjung, M.S Selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. Akhirmen Bus, M.Si selaku pembimbing dua. Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan dari Beliau.

Selanjutnya, penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan sekaligus selaku penelaah yang telah memberikan kritik dan saran guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Akhirmen Bus M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan kemudahan-kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh staf Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas selama perkuliahan.

4. Karyawan-Karyawati ruang baca Fakultas Ekonomi dan pustaka pusat Universitas Negeri Padang, yang telah banyak memberikan bantuan dalam pencarian sumber buku untuk penulisan skripsi ini.
5. Karyawan bagian Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Wali nagari Salo kecamatan Baso yang telah membantu memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data penelitian ini.
8. Teman-teman Prodi EP 2006 yang terus memberikan semangat dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin....

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak, penulis ucapan terima kasih.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Msalah..... | 10 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 11 |
| D. Perumusan Masalah | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN | |
| HIPOTESIS | |
| A. Kajian Teori | 13 |
| 1. Konsep dan Teori Kredit..... | 13 |
| 2. Kredit Bagi Hasil | 21 |
| 3. Baitul Maal Wat Tamwil | 23 |
| 4. Pendapatan | 28 |
| 5. Pengaruh Pinjaman terhadap Pendapatan | 32 |
| B. Temuan Penelitian Sejenis | 34 |
| C. Kerangka Konseptual | 35 |
| D. Hipotesis | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 37 |
| C. Variabel Penelitian | 37 |

| | |
|---|-----------|
| D. Populasi..... | 38 |
| E. Pengambilan Sampel | 38 |
| F. Jenis dan Sumber Data | 40 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| H. Definisi Operasional | 42 |
| I. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| 1. Gambaran Umum Objek Penelitian | 50 |
| 2. Karakteristik Responden | 58 |
| 3. Deskripsi Variabel Penelitian | 61 |
| 4. Analisis Induktif..... | 65 |
| B. Pembahasan..... | 69 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 72 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan / <i>Million</i> Rupiah) Tahun 2004 – 2008..... | 4 |
| Tabel 2 Perkembangan Jumlah Peminjam BMT di Nagari Salo Kecamatan Baso periode 2008-2010 (dalam orang)..... | 8 |
| Tabel 3 Populasi Penelitian..... | 38 |
| Tabel 4 Geografis Nagari Salo | 50 |
| Tabel 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Umur dan Jenis Kelamin | 51 |
| Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 52 |
| Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... | 53 |
| Tabel 8 Deskriptif Tingkat Usia Nasabah BMT Nagari Salo | 58 |
| Tabel 9 Deskriptif Tingkat Pendidikan Nasabah BMT Nagari Salo..... | 59 |
| Tabel 10 Deskriptif Tingkat pekerjaan Nasabam BMT Nagari Salo..... | 60 |
| Tabel 11 Deskriptif Guna Pinjaman Bagi Nasabah BMT Nagari Salo..... | 61 |
| Tabel 12 Distribusi Pinjaman Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang disalurkan kepada Masyarakat di Nagari Salo | 62 |
| Tabel 13 Distribusi Pendapatan Masyarakat di Nagari Salo..... | 64 |
| Tabel 14 Hasil Uji Normalitas | 64 |
| Tabel 15 Hasil Uji Glasjer | 66 |
| Tabel 16 Nilai Koefisien Regresi Linear Sederhana..... | 67 |
| Tabel 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|----------------|
| Gambar 1: Kerangka Konseptual | 35 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Tabulasi Data Penelitian dan Data Logaritma serta Analisis Uji Heterokedastisitas | 76 |
| 2. Uji Prasyarat Analisis | |
| a. Hasil Uji Normalitas..... | 77 |
| b. Uji Glesjer | 77 |
| 3. Analisis Regresi Sederhana..... | 78 |
| 4. Tabel t | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Tingginya angka kemiskinan di suatu negara akan menghambat pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan serta akan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup suatu Bangsa.

Pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat merupakan strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat (*people centered development*), yang arahnya menuju pada kemandirian masyarakat serta membawa kearah peningkatan perekonomian. Hal ini relevan dengan kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. (Sumardjo dan Saharudin dalam Bardaini, 2006:67). Program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development Approach*) saat ini menjadi harapan besar mengingat kunci pengentasan kemiskinan pada hakekatnya terletak pada kekuatan masyarakat sendiri. Untuk itu diperlukan upaya memberi daya kepada masyarakat atau dengan kata lain

memberdayakan masyarakat. Upaya memberi daya tersebut tidak hanya selalu diartikan sebagai bantuan finansial, tetapi pemberdayaan dalam tataran praktis memerlukan tindakan kongkrit yang dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat baik dari segi kemampuan (*capacity*) ataupun keterampilan (*skill*) yang disebut dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menjadi faktor penting dalam suatu program penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan ataupun di pedesaan.

Hernandi de Soto (dalam Majid, 2002:1) menggambarkan betapa besarnya sektor ekonomi informal memainkan perannya dalam aktivitas ekonomi di negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan modal. *Asset* di negara berkembang tidak mampu menjadi modal kerja karena asset tersebut tersandung masalah kepemilikan (*property right*). Sedangkan pinjaman untuk keperluan penambahan modal diperlukan ketegasan kepemilikan. Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah pedesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan pinjam yang mampu bekerja sama dengan kondisi sosial kultural serta kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Sedikitnya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masalah ketimpangan pendapatan masyarakat Hal ini menyebabkan munculnya Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai kembaga pemberi pinjaman modal usaha bagi

masyarakat. BMT juga memberikan peranan pemberdayaan pada masyarakat dalam mengembangkan usaha dan peningkatan pendapatan.

BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT dikelola secara syariah tanpa bunga karena bunga menurut agama Islam adalah riba yang dalam keyakinan iman orang muslim adalah haram. Penggantian istilah “Bunga” menjadi “Bagi Hasil” bukan semata-mata hanya mengalihkan istilah atau nama saja tapi lebih memiliki nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran dan kasih sayang, tidak ada penindasan manusia atas manusia dan sesuai syariat Islam.

Keberadaan BMT sebagai sistem pembiayaan bank syari’ah dengan sistem bagi hasil dapat memotivasi dan meningkatkan keuletan berusaha, hal tersebut dikarenakan adanya bimbingan pengelolaan modal dan usaha dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan adanya BMT yang diiringi dengan bimbingan pengelolaan modal dan usaha dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro maupun pendapatan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang..

Peningkatan pendapatan usaha mikro seringkali mengalami kendala, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan. Pendapatan merupakan kenaikan kotor

dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan (Antonio, 2001:204).

Dilihat dari Pendapatan Regional kebupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2008 Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Agam terus mengalami perkembangan, namun struktur perekonomiannya cenderung sama dari tahun ke tahun. Sebagaimana daerah agraris, PDRB kabupaten Agam masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1, yaitu:

Tabel 1: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan / *Million* Rupiah) Tahun 2004 - 2008

| Lapangan usaha | Tahun | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Pertanian | 953.522,05 | 1.230.982,18 | 1.533.420,73 | 1.815.783,77 | 2.128.923,22 |
| Pertambangan dan Penggalian | 131.919,30 | 148.991,21 | 168.270,67 | 184.428,19 | 214.102,03 |
| Industri Pengolahan | 391.691,54 | 432.553,56 | 468.961,02 | 508.903,58 | 592.565,11 |
| Listrik, Gas dan Air Minum | 31.921,42 | 36.115,97 | 41.478,79 | 44.898,01 | 47.884,91 |
| Bangunan | 141.163,16 | 167.339,59 | 193.679,82 | 227.349,73 | 271.381,14 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 480.770,58 | 538.188,59 | 602.709,72 | 671.456,95 | 796.698,69 |
| Pengangkutan & Komunikasi | 144.527,34 | 171.948,27 | 199.803,78 | 231.226,63 | 270.620,85 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 118.682,53 | 136.872,63 | 157.282,06 | 177.118,35 | 202.900,41 |
| Jasa-jasa | 473.680,89 | 514.965,22 | 559.160,31 | 594.293,99 | 680.546,85 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pada tahun 2008 nilai tambah sektor pertanian mencapai Rp 2.128.923,22 miliar dari total nilai tambah kabupaten Agam. Sektor berikutnya yang menyumbang cukup besar bagi pembentukan PDRB kabupaten Agam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar Rp 796.698,69 miliar dari total PDRB kabupaten Agam. Sektor lainnya berturut-turut menyumbang sebesar 680.546,85 untuk sektor jasa-jasa, Rp 270.620,85 dari sektor industri pengolahan, Rp 592.565,11 dari sektor pengangkutan dan komunikasi, Rp 271.381,14 dari sektor bangunan, Rp 214.102,03 dari sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan Tabel 1 di atas pendapatan tertinggi terdapat pada sektor pertanian berbanding jauh dengan sektor lain. Seharusnya sektor lain dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal ini yang membuat keberadaan BMT sangat dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan di sektor lain.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di seluruh kecamatan di kabupaten Agam maka Pemda melalui Bupati menugaskan perangkat nagari untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keluarga Sakinah (KJKS) Baitul Maat wat tamwiil (BMT). Pembentukan ini dilatarbelakangi karena melihat kondisi rill masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat *rentenir*, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Kebijakan yang dilakukan PEMDA kabupaten Agam dengan memerintahkan kepada perangkat nagari di seluruh kabupaten Agam untuk mengembangkan lembaga BMT. Diman BMT adalah suatu kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam peningkatan pendapatan. Pembentukan lembaga berupa BMT ini dimotori oleh PEMDA kabupaten Agam dengan membentuk Agam Madani. PEMDA memberikan dana sebesar Rp.300.000.0000 bagi nagari yang mau mendirikan BMT. Dana ini merupakan Hibah dari PEMBA dimana dana ini yang akan dijadikan sumber pinjaman bagi masyarakat nagari.

Pendirian BMT merupakan keinginan bersama dari PEMDA kabupaten Agam. Pendirian ini merupakan terobosan sekaligus *action* dilapangan dalam mengatasi persoalan umat, terkait dengan ekonomi terutama masalah kemiskinan. Selain itu pendirian ini dilakukan sebagai langkah awal yang nantinya diharapkan mampu sebagai contoh diseluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat untuk mengangkat ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pembentukan lembaga kredit berupa BMT merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan perekonomian daerah. Dengan adanya lembaga kredit berupa BMT akan mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan hidup masyarakat. Semakin baik tingkat kehidupan masyarakat maka semakin baik perekonomian suatu daerah.

Kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selama ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Sebelum adanya BMT masyarakat mengalami

kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Hal itu dikarenakan tidak adanya lembaga daerah yang menyediakan pinjaman modal usaha. Sekarang di setiap nagari di kabupaten Agam telam mengembangkan lembaga BMT. Masyarakat di tiap nagari tiadak lagi mengalami kesulitan lagi dalam mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan adanya BMT mesyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan usaha.

Di nagari Salo kecamatn Baso kebaradaan BMT sangat diperlukan masyarakat, terkait masih sulitnya masyarakat mendapatkan penjaman modal untuk mengembangkan usaha. Selama ini modal usaha menjadi kendala bagi mereka untuk meningkatkan produktifitas usaha terutama pada mata pencahariaan disektor pertanian dan perdagangan yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso. Dengan adanya BMT akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup. Selain itu, dengan adanya pinjaman BMT masyarakat juga dapat menciptakan lapanga usaha baru dan mangembangkan usaha mikro lainnya. Besarnya minat masyarakat untuk melakukan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan dan kasejahteraan hidup masyarakat dapat terlihat pada Tabel jumlah peminjan BMT di nagari Salo kecamatan Baso berikut:.

Tabel 2: Perkembangan Jumlah Peminjam BMT di Nagari Salo Kecamatan Baso periode 2008-2010 (dalam orang).

| No | Bulan | Tahun | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Januari | - | 8 | 11 |
| 2 | Februari | - | 10 | 6 |
| 3 | Maret | - | 9 | 8 |
| 4 | April | - | - | 7 |
| 5 | Mei | - | 7 | 10 |
| 6 | Juni | - | 7 | 9 |
| 7 | Juli | - | 8 | 11 |
| 8 | Agustus | - | 9 | 14 |
| 9 | September | - | 10 | 12 |
| 10 | Oktober | - | 11 | - |
| 11 | November | - | 14 | - |
| 12 | Desember | 23 | 16 | - |
| Jumlah | | 23 | 110 | 88 |

Sumber: BMT nagari Salo kecamatan Baso, 2010

Pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah peminjam di BMT nagari Salo dari awal berdiri yaitu 1 Juli 2008 sampai 27 September 2010. Proses peminjaman di BMT nagari Salo baru dimulai pada tanggal 1 Desember 2008-27 September 2010 (sekarang). Dari Tabel di atas terlihat jumlah peminjam pada tahun awal peminjaman BMT yaitu pada bulan desember 2008 adalah 23 orang peminjan, sedangkan pada tahun 2009 terdapat 110 orang peminjam dan pada tahun 2010 terdapat 88 orang yang dihitung sampai tanggal 27 September. Pada tahun 2009 bulan April peminjaman dana tidak dapat dilakukan karena kuota peminjaman penuh. Pada Tabel di atas dapat terlihat bahwa peminjan BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat nagari Salo dengan tingginya jumlah peminjam sebanyak 23 orang pada awal berdirinya BMT di nagari Salo. Dari hal ini terlihat bahwa kesulitan mendapatkan tambahan modal usaha selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan.

Pada Tabel di atas dapat digambarkan bahwa jumlah peminjaman di BMT nagari Salo kecamatan Baso cukup tinggi terutama pada awal berdirinya BMT. Walaupun terjadi naik turun peminjaman, namun keinginan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan terlihat cukup besar. Berdasarkan data peminjaman BMT pada table 2 juga terlihat bahwa masyarakat nagari Salo memanfaatkan benar keberadaan BMT. Mereka menjadikan BMT sebagai tempat meminjam uang untuk tambahan modal usaha. Selama ini masyarakat kesulitan mendapatkan pinjaman modal usaha sehingga mereka sulit untuk mengembangkan usaha.

Kesulitan masyarakat mendapatkan modal dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha selama ini di kecamatan di kabupaten Agam menjadikan BMT sebagai solusi tepat untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan lembaga BMT membuka peluang bagi masyarakat terutama masyarakat nagari Salo untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mendapat kemudahan dalam mengembangkan usaha yang telah ada terutama dibidang pertanian dan perdagangan.

Masyarakat di nagari Salo yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak. Dengan adanya BMT mereka lebih mudah dalam mengembangkan usahanya baik dibidang pertanian maupun perdagangan dan pertanian. dibidang pertanian mereka mereka memanfaatkan pinjaman BMT untuk membeli bibit unggul, pupuk dan alat pengolahan lahan. Di bidang perdagangan dan peternakan pinjaman BMT

digunakan untuk menambah modal dagang dan jumlah ternak gembalaan.

Deangan adanya BMT masyarakat nagari Salo juga sudah mulai berani mengembangkan usaha-usaha mikro, seperti pengembangan industri-industri rumah tangga. Selain sebagai tambahan modal usaha BMT juga dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk konsumsi.

Dengan adanya penambahan modal usaha yang diberikansa BMT berupa pinjaman kredit, seharusnya masyarakat benar-benar dapat memanfaatkanya pinjaman BMT untuk meningkatkan produktifitas usaha, peningkatan pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peminjam. Setelah adanya lembaga BMT pertumbuhan perekonomian daerah diharapkan dapat meningkat. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh pinjaman BMT terhadap peningkatan pendapatan dalam penelitian yang berjudul **”Pengaruh Pinjaman Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Terhadap Pendapatan Masyarakat di Nagari Salo Kecamatan Baso”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Pinjaman Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso.

2. Pengaruh jenis usaha atau pekerjaan nasabah BMT terhadap pendapatan masyarakat nagari Salo kecamatan Baso.
3. Pengaruh jumlah pinjaman nasabah BMT terhadap pendapatan masyarakat nagari Salo kecamatan Baso.

C. Pembatasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti dan juga disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga, maka penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh pinjaman Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu sejauhmana pengaruh pinjaman Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, merupakan salah satu syarat untuk menperoleh gelar sarjana ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang, serta menambah wawasan penulis dalam menulis karya ilmiah.
2. Pengembangan ilmu ekonomi mikro.
3. Pemerintah, sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk membantu membuat kebijakan masalah Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Terhadap pendapatan masyarakat
4. Penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Teori Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran. Suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit akan memenuhi janjinya serta melunasi hutang-hutangnya serta terikat bunga yang telah ditetapkan.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Menurut Drs. Thomas Suyatno, et.al. dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, menjelaskan bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat (Hasibuan, 2005:87).

Pengertian pemberian atau kredit usaha BMT (sesuai prinsip syariah) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Sedang menurut Sinungan, (1993:120)

“Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontra prestasi berupa pendapatan bunga.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit usaha adalah penyediaan uang yang dimiliki oleh bank untuk disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pihak lain.

a. Unsur-unsur Kredit

Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit usaha adalah penyediaan uang yang dimiliki oleh bank untuk disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pihak lain.

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahawa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh

kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan memberikan kreditnya kepada pihak lain.

Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam kredit (dalam Haristian, 2005:30) yaitu:

1) Waktu

Yaitu yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasan.

2) Kepercayaan

Yaitu yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3) Penyerahan

Yaitu yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.

4) Resiko

Yaitu yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.

5) Persetujuan/perjanjian

Yaitu yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan perjanjian.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit di atas terdapat beberapa persetujuan yang harus dipahami dan disetujui oleh kreditur (yang

memberikan pinjaman) dan deditur (peminjam) dalam melakukan pinjaman dalam memberikan pinjaman dan pelunasan pinjaman. Dimulai dari waktu peminjaman yang diberikan oleh kreditir sampai pada waktu pelunasan yang dilakukan oleh debitur. Selain itu kepercayaan, resiko dan perjanjian atau persetujuan juga harus dipahami oleh kreditur dan debitur.

b. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Menurut Kasmir (2005:4) kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.

c. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan BMT

Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau "*the five C's principles*". Adapun prinsip dari 5C (dalam Bardaini, 2006:37) adalah:

1) *Charakter* (karakter)

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari ability to play atau kemampuan dalam membayar.

3) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada

suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

4) *Capital* (modal)

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

5) *Condition* (situasi dan kondisi)

Condition, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

d. Kebijakan BMT Tentang Kredit Usaha

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha BMT. Dana yang dimiliki BMT, baik yang berasal dari simpanan (lancar, berjangka, khusus) maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Aman.
- 2) Lancar.
- 3) Menghasilkan.

e. Jenis-jenis pembiayaan atau kredit usaha BMT

Berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan (dalam Bardaini, 2006:30) dibedakan dalam:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- 2) Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.
- 3) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi). Penelitian ini, penulis menggunakan pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan atau kredit usaha BMT yang ditujukan untuk memberikan modal usaha antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

Berdasarkan cara pembayaran/Angsuran bagi hasil, dibedakan dalam:

- a) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.

- b) Pembiayaan dengan angsuran pokok periodik dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan bagi hasil dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
- c) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran.

Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan (dalam Bardaini, 2006:31) yaitu:

- 1) Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran mengikuti prinsip *Time Value of Money*, yaitu nilai angsuran akan berpijak pada nilai uang yang berlaku saat ini. Tipe ini angsuran pokok pinjaman menurun dan bagi hasil naik.
- 2) Flat, yakni angsuran pokok dan bagi hasil merata untuk setiap periode.
- 3) Sliding, yakni angsuran pokok pinjaman tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pinjaman (*outstanding*).

Berdasarkan jangka waktu pemberian pembiayaan/kredit usaha (dalam Bardaini, 2006:31), dibedakan dalam:

- a) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.
- b) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.

- c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

2. Kredit Bagi Hasil

a. Pengertian Kredit Bagi Hasil

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 6 ayat m, dinyatakan bahwa usaha bank meliputi penyediaan bagi hasil nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bagi hasil ialah cara perhitungan rasio bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan atau hasil usaha nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh nasabah. Berdasarkan nisbah bagi hasil :

- 1) Besarnya nisbah atau porsi bagi hasil untuk pembiayaan ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan USP Syariah dengan nasabah.
- 2) Penentuan nisbah tersebut oleh USP Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh USP Syariah. (Panduan USP Syariah, 1998:55).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit bagi hasil ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan pendapatan atau hasil usaha, bukan keuntungan yang diperoleh nasabah.

b. Manfaat Kredit Unit Simpan Pinjam Syariah :

- 1) Bagi anggota unit simpan pinjam syariah :

- a) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produksinya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau menambah usaha baru.
 - b) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus
 - c) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal usaha produktifnya.
- 2) Bagi unit simpan pinjam syariah
- a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan usaha USP Syariah.
 - b) Memungkinkan USP Syariah untuk memiliki usaha produktif sesuai kebutuhan anggota. (USP Syariah, 1998:46).
- Dalam penelitian ini manfaat kredit bagi hasil adalah menambah modal, meningkatkan pendapatan dan memperoleh usaha produktif.
- c. Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil**
- 1) Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha) nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh nasabah.
 - 2) Besarnya nisbah bagi hasil :
 - a) Besarnya nisbah (porsi) bagi hasil untuk pembiayaan ini ditentukan sesuai kesepakatan antara USP syariah dengan nasabah.

b) Penentuan nisbah tersebut oleh USP Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh USP Syariah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34: "...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan terjadi esok..."

Dalam kenyataannya pendapatan para pedagang atau anggota setiap harinya juga tidak pasti atau berubah-ubah, oleh karena itu penetapan bagi hasil hanyalah sebatas nisbah (persentase) saja, kalaupun disebutkan nilai nominalnya, itu hanya sekedar estimasi saja dan tentu setiap hari dihitung kembali sesuai kenyataan yang terjadi.

3. BMT (Baitul Maal Wattamwil)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (Ridwan, 2004:126). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi.

Menurut Suarsono (2003:96) peran umum yang dilakukan BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Muawanah (2005:1) BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah formal yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah. Baitul Maal Wattamwil (BMT) /Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan masyarakat yang diselenggarakan dan dikelola berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama islam, yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan dana yang bersifat komersial dari pihak ketiga yang berbentuk simpanan anggota dan penyertaan lainnya, serta dana yang bersifat non komersial seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sumbangan lainnya.

Konsep BMT desa merupakan konsep pengelolaan dana (simpan pinjam) ditingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Sebagai salah satu bentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro), BMT (Baitul Maal Wattamwil) memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan Baitul Maal salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika Baitul Maal tersebut mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Kedua, BMT merupakan Baitut Tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT mesti profesional. Sedangkan karyawan dituntut kemampuan entrepreneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan risiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.

b. Kegiatan Utama BMT

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitut Tamwil dan Baitul Maal. Baitut Tamwil bergiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

ekonomi. Sedangkan Baitul Maal menerima titipan zakat, infaq dan shadaqoh serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Kegiatan yang dikembangkan BMT (dalam Bardaini, 2006:36) adalah:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada sebagai imbalan atas jasa pembiayaan.
- 3) Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lainnya.

c. Kegiatan penunjang BMT

Kegiatan penunjang usaha bagi BMT adalah dari sisi kegiatan sosial yakni untuk membantu meringankan beban ekonomis anggota dengan tidak mengambil keuntungan finansial. Kegiatan sosial (dalam Bardaini, 2006:35) ditempuh dengan:

- 1) Memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non produktif seperti : berobat, biaya sekolah, dan lain-lain. Bantuan

tidak komersial dibutuhkan oleh sebagian anggota BMT terutama pada tahap awal mereka menjadi anggota.

- 2) Pembiayaan untuk belajar usaha diberikan kepada anggota yang sangat miskin dan mempunyai keinginan memulai usaha. Sebagai pengusaha pemula, anggota ini belum mempunyai keterampilan dan pengalaman, sehingga belum layak menerima pembiayaan dari dana untuk bisnis.
- 3) Pendidikan dan bimbingan usaha secara informal dan nonformal kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha dan bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya.
- 4) Pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh anggota agar benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini BMT harus mampu menanamkan keteguhan hati agar anggota membelanjakan hasil usaha itu sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendidikan dan penyuluhan moral serta peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, seperti pendidikan tentang budi pekerti, penyuluhan kesehatan, kebersihan, pendidikan anak, keutuhan keluarga dan lain-lain.

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut (Wasis dalam Putri, 2011:23) Pendapatan adalah balas jasa dalam nilai uang yang diterima oleh tenaga kerja (gaji), kreditur (bunga), pemilik modal (laba, deviden), pemilik harta (sewa) dan lain-lain. Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Budiono dalam Wahyuni, (2009:26) mengemukkan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut (Winardi dalam Wahyuni, 2009:26) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Indonesia dikatakan bahwa pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari pengaruh barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam akuntansi pendapatan dan beban dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank

selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak secara langsung berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Macam-macam Pendapatan

Biro Pusat Statistik tahun 2002 merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan dari :
 - a) Gaji dan upah yang diperoleh dari :
 - (1) Kerja pokok
 - (2) Kerja sampingan
 - (3) Kerja lembur
 - (4) Kerja kadang-kadang
 - b) Usaha sendiri yang meliputi :
 - (1) Hasil bersih dari usaha sendiri
 - (2) Komisi dari mana saja
 - (3) Penjualan dari kerajinan rumah yang dihasilkan
 - c) Hasil investasi yaitu pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah atau modal yang digunakan orang lain.
 - d) Keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial
- 2) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa:
 - a) Bagian pembayaran upah dari gaji yang dibentuk dalam: bonus, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi.
 - b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain :
 - (1) Barang yang diproduksi di rumah.

- (2) Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah yang ditempati.
- c) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa: pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman utang, kiriman uang, warisan (Sumardi 1990:5).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan tidak hanya berupa uang tunai yang diterima oleh masyarakat dari hasil suatu pekerjaan. Tetapi semua yang diterima oleh masyarakat baik dalam berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka disebut juga dengan pendapatan.

c. Sumber Pendapatan

Menurut Sumardi (1982:94) pendapatan yang diterima seseorang berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang bersumber dari upah atau gaji yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- 2) Pendapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti dagang, tukang dan buruh.
- 3) Pendapatan sub intern, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha sendiri seperti dari hasil bercocok, hasil dari beternak, hasil dari kebun dan sebagainya.

Berdasarkan pernyataan di atas, pendapatan sektor formal merupakan pendapatan berasal dari gaji yang diperoleh secara tetap, dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan pendapatan sektor informal berasal dari penghasilan tambahan yang jumlahnya tidak dapat ditetapkan seperti berdagang dan pendapatan sub intern berasal dari usaha sendiri.

Kemudian definisi pendapatan menurut BPS Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan berupa uang yaitu pendapatan dari:
 - 1) Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, sampingan, lembur, dan sewaktu-waktu.
 - 2) Pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri
 - 3) Hasil investasi pendapatan dari hak milik.
- b. Pendapatan berupa barang, dapat berupa:
 - 1) bagian dari pembayaran upah dan gaji yang dibayarkan dalam bentuk beras, pengobatan, atau transpor dan perumahan.
 - 2) barang yang diproduksi dirumah dan dikonsumsi sendiri.
- c. Penerimaan yang bukan pendapatan, seperti pengambilan tabungan, penjualan barang atau yang dipakai untuk penagihan piutang, pinjaman utang, kiriman uang serta hadiah.

Jadi pendapatan adalah jumlah seluruh penghasilan yang diterima rumah tangga produksi dalam hal ini adalah masyarakat miskin penerima manfaat dana bergulir atas pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dinilai dengan uang atas harga yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Bintari dan Suprihatin (1984:35) yaitu:

- 1) Kesempatan kerja yang terbatas.

Semakin banyaknya kesempatan bekerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang biasa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2) Kecakapan dan keahlian.

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya bepengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Motivasi.

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan semakin besar pula untuk memperoleh penghasilan.

4) Keuletan bekerja.

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantang bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.

5) Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan.

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

5. Pengaruh Pinjaman Terhadap Pendapatan Masyarakat

Jusuf M. Colter (dalam Wijaya, 1996:319) menyatakan bahwa hubungan pendapatan usaha terhadap besar kecilnya kredit usaha ditentukan oleh

pendapatan yang diharapkan. Pendapatan yang diharapkan diinterpretasikan oleh dua hal yaitu:

- a. Makin tinggi pendapatan yang diharapkan dari usaha akan menyebabkan makin sedikit usaha yang melakukan pinjaman atau kredit. Hal ini terjadi jika kebutuhan penyediaan konsumsi, produksi, penyediaan sarana prasarana produksi dapat dipenuhi sendiri oleh pengembang usaha.
- b. Makin tinggi pendapatan yang didapatkan peminjam akan menyebabkan makin banyak masyarakat melakukan pinjaman atau kredit. Hal ini terjadi jika pendapatan dari usaha belum dapat menunjang kebutuhan konsumsi, produksi, penyediaan sarana prasarana. Sehingga pendapatan yang diharapkan dapat menunjang kemampuannya untuk membayar kembali pinjamannya agar tidak terjadi kredit macet.

Menurut Bintari dan Suprihatin (1984:35) banyak sedikitnya modal yang dipegunakan merupakan salah faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal atau kredit yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Pendapatan adalah semua imbalan jasa, termasuk upah dan pembayaran khusus, keuntungan, bunga dan untung perorangan dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia (Mukijat dalam Rino, 2007:7-8). Pendapatan atau income adalah jumlah uang berupa laba, bunga dan sebagainya yang berasal dari usaha, profesi yang dimiliki (Suwandi dalam Rino, 2007:8).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang didapat seseorang yang berasal dari usaha, profesi, keuntungan, bunga dan imbalan jasa dalam waktu tertentu dan dapat dibelanjakan dinamakan pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapatan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu usaha.

Penelitian Bardaini (2006:86-92) terhadap pendapatan masyarakat di kecamatan Karanganyar di kabupaten Tegal, pemberian kredit kepada masyarakat menunjukkan adanya hubungan antara pemberian kredit dengan tingkat pendapatan masyarakat. Dimana dalam penelitian tersebut 65% pendapatannya mengalami peningkatan setelah adanya bantuan kredit. Tetapi ada dua kemungkinan yang terjadi:

- 1) Bertambahnya modal (kredit) mengakibatkan bertambahnya pendapatan.
- 2) Bertambahnya modal (kredit) tidak mengakibatkan bertambahnya pendapatan.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian yang sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang pendapat yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian kredit.

1. Haristiana (2006:63-64) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kredit Bagi Hasil BTM Surya Mentar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang kecil di kecamatan Karanganyar

Kabupaten Pekalongan".dalam penelitiannya disimpulkan bahwa kredit bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil.

2. Bardaini (2006:86-92) melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Kredit Usaha Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dengan Pendapatan Usaha Mikro di Kebupaten Tegal". Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa antara variabel kredit usaha BMT (X) dengan pendapatan usaha mikro (Y) terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro dan hubungan kredit dengan pendapatan usaha mikro. Sedangkan peneliti pada penelitian ini akan meneliti pengaruh pinjaman terhadap pendapatan masyarakat. Antara pinjaman dan kredit tidak memiliki perbedaan yang begitu jauh, bedanya cuma pada cara peminjaman dan sistem bunga pinjaman. Kredit memakai metode penghitungan bunga sedangkan pinjaman disini menerapkan sistem kredit bagi hasil.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pengaruh BMT (Baitul Maal Wattamwil) Terhadap Pendapatan Masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso.

Dimana:

X = pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Y = Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberian pinjaman BMT (X) akan mempengaruhi tingkat pendapatan (Y) masyarakat. Pinjaman merupakan tambahan modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Semakin besar modal yang dapat dipinjam maka makin semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatan masyarakat (Y) dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang didapat masyarakat. Dalam hal ini pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso merupakan variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil), yang melihat seberapa besar pengaruh pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil) terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso.

Kemudian hipotesis statistik penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil) (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat di nagari Salo kecamatan Baso dengan tingkat pengaruh sebesar 0,294 persen. Dimana pinjaman BMT (Baitul Maal Wattamwil) sebagai variabel bebas (X) mempunyai nilai rata-rata Rp.1.712.162,16 dengan koefisien variasi 41.64 persen. Ini berarti bahwa tingkat variasi atau keragaman masing-masing data dengan rata-ratanya sebesar 41.64 persen sedangkan pendapatan masyarakat sebagai variabel terikat (Y) mempunyai nilai rata-rata Rp.1.581.170,14 dengan koefisien variasi 24,81 persen. Ini berarti bahwa tingkat variasi atau keragaman masing-masing data dengan rata-ratanya adalah sebesar 24,81 persen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman Baitul Maal Wattamwil (BMT) di nagari Salo kecamatan Baso sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dan lebih selektif agar pinjaman yang diberikan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatannya.

2. Kepada masyarakat nagari Salo kecamatan Baso agar dapat memanfaatkan pinjaman Baitul Maal Wat tamwil (BMT) yang didapat semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan pendapatan.
3. Kepada PEMDA kabupaten Agam agar lebih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat di tiap-tiap nagari di kecamatan Baso maupun di seluruh kabupaten Agam dan memberikan tambahan-tambahan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Kepada pihak lembaga BMT yang memberikan pinjaman kepada masyarakat di nagari Salo maupun di nagari-nagari lain di kecamatan Baso disaran agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal. Selain itu lembaga BMT diharapkan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar penggunaan pinjaman dapat dioptimalkan dalam peningkatan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2005. *Buku Ajar Statistika 1*. Padang: FE UNP.
- Antonio, Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bardaini, Muhammad 2006. *Hubungan Kredit Usaha Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dengan Pendapatan Usaha Mikro di Kebupaten Tegal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang (tidak dipublikasikan).
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Bank Muamalat Indonesia. 1998. *Panduan USP Syari'ah*. Dapartemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Bank Muamalat Indonesia. Jakarta : P.T. Bank Muamalat Indonesia.
- Haristiana, Happi. 2005. *Pengaruh Kredit Bagi Hasil BTM Surya Mentari Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Kasmir. 2005. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Majid, Ali. 2001. *Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) AMMA Malang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang
- Muawanah, Umi dan Fahmi Poernawati. 2005. *Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jilid 2* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- _____.2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta AMP YKPN.
- Putri, Rahma.2011. *Pengaruh Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Pendapatan Industri Kecil di Kota Padang*. Skripsi Universitas Negeri Padang.(tidak dipublikasikan)